

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

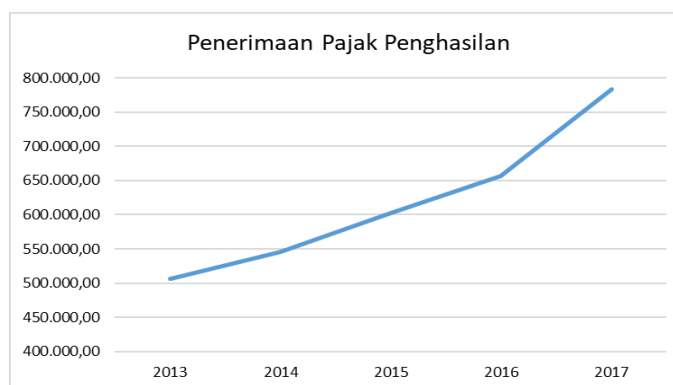
Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan ini diperlukan strategi yang tepat agar tercapai pemerataan perekonomian (Alsafasi Randi, 2010). Ai Nety, 2017 mengungkapkan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara adalah dapat dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional yang untuk pelaksanaan tahunannya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara dalam rangka terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama

penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2103-2017



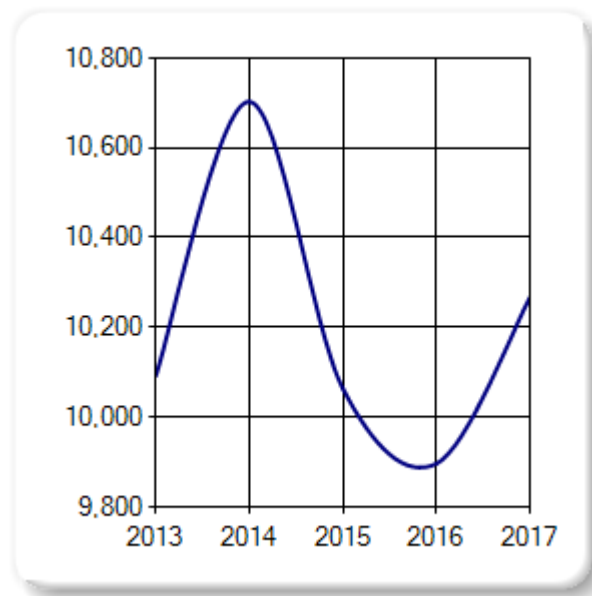
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami kenaikan data diperoleh pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami kenaikan pertahun. Dari data yang diperoleh dari tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan 4,88%. Dan pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan 5,02%. Kondisi ini terus mengalami

kenaikan pertahun, pada 2017 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,1%. (*sumber: Badan Pusat Statistik*) dalam Bayu, 2108.

Terlepas dari pajak dan pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, nilai tukar Rupiah (Kurs) juga harus diperhatikan dan menjadi hal yang harus mendapatkan porsi yang lebih untuk menanganinya. Saat ini posisi nilai tukar Rupiah masih bergejolak dan cenderung melemah. Pengamat Ekonomi Faisal Basri (2018) mengungkapkan, anjloknya nilai tukar Rupiah karena lemahnya daya tahan mata uang Indonesia ini terhadap gejolak yang terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun disisi lain pelemahan mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dikatakan memiliki nilai positif terhadap penerimaan Negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Robert Pakpahan (2018) mengatakan keuntungan tersebut menurutnya hanya berlaku untuk jangka pendek dalam indikator penerimaan pajak saja. Kontan.com

Gambar 1.2
Grafik Time Series Tingkat Mata Uang (Kurs) Tengah
Tahun 2013-2017



Sumber : Bank Indonesia, 2018

Efek negatif pelemahan rupiah tak terhindarkan, terutama bagi sektor yang banyak melakukan aktivitas impor dan memiliki rasio utang tinggi. Sebagai contoh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang mayoritas memasok bahan baku dari luar negeri. Direktur Utama KLBF Vidjongtius dalam Kontan.com (2018) menyatakan pelemahan rupiah mengerek biaya produksi, khususnya pada komponen bahan baku. Untuk meminimalisir efek kenaikan biaya produksi, perusahaan meninjau harga jual produk secara terbatas. Selain itu, efisiensi internal dalam supply chain dan peningkatan produktivitas. Ini menyebabkan saham sektor farmasi masih berpotensi turun 4%-7% dalam jangka menengah.

Emiten yang memiliki leverage tinggi serta rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) di atas 1 kali juga harus waspada. Sebab, di tengah berakhirnya era suku bunga rendah, emiten dengan DER tinggi akan mengalami peningkatan beban keuangan yang signifikan. Apalagi jika BI mengaktifkan lagi SBI. Itu akan memberatkan keuangan emiten dengan beban utang besar William (2018) dalam kontan.com.

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan ketidaktepatan penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. SAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan (*mandatory*). Sementara panduan yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan

pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok . Bayu (2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerimaan pajak. Dimana penulis akan melakukan penelitian tentang topik tersebut dan membuat karya tulis dengan topik tersebut dengan judul **“Pengaruh Kenaikan Tingkat Mata Uang (Kurs) Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Akuntansi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Tedaftar Di BEI Periode 2013-2017)”**.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Apakah kenaikan tingkat mata uang (kurs) berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?

1.2.2. Apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan kenaikan tingkat mata uang dan penerimaan pajak ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis perlu untuk melakukan pembatasan masalah. Berdasarkan judul Skripsi, yaitu **“Pengaruh Kenaikan Tingkat Mata Uang (Kurs) Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Akuntansi (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi Yang Tedaftar Di BEI Periode 2013-2017)”** maka batasan masalahnya sebagai berikut :

- 1.3.1. Penerimaan Pajak Penghasilan badan
- 1.3.2. Kurs Rata-rata Tahunan Rupiah terhadap USD (Kurs Menteri Keuangan RI)
- 1.3.3. Data periode tahun 2013-2017
- 1.3.4. Kebijakan akuntansi yang digunakan adalah metode persediaan, depresiasi dan penilaian piutang.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui apakah kenaikan tingkat mata uang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- 1.4.2. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan kenaikan tingkat mata uang dan penerimaan pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi apakah kenaikan nilai mata uang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang berhubungan dengan teori tentang kebijakan fiskal.

- 1.5.2. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian dimasa yang akan datang berkaitan dengan ilmu/teori tentang kebijakan fiskal.

1.5.3. Untuk Pembaca

Laporan ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama

1.5.4. Untuk Penulis

Merupakan tambahan pengetahuan berkaitan dengan penerimaan pajak serta mengetahui pengaruh tingkat mata uang terhadap penerimaan pajak Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi tentang penjelasan nilai mata uang (kurs), penerimaan pajak, dan kebijakan akuntansi. Bab 2 juga terdapat hipotesis dan kerangka pikiran dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas sampel data populasi penelitian, sumber data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data, variabel penelitian. Metode analisis data, pengujian instrumen pengukuran, dan uji analisis data menggunakan *software* SPSS.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil dari semua alat uji yang digunakan serta pengujian hipotesis.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. . Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian, sedangkan saran mengacu pada keterbatasan penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.